

DETERMINAN KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* PADA PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA

Mona Ajeng Puspaningrum¹, Sugeng Pamudji

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the information about The determinants of existence Risk Management Committee in Indonesia. This study was conducted by using independent variables are number Board of Commissioners, Proportion Independent Commissioner, Reputation of External Auditor, Corporate Complexity, Leverage and Financial Reporting Risk and its was used control variable is size of company. Existence of Risk Management Committee has two forms, they are Risk Management Committee joined with the Audit Committee and Risk Management Committee, which is separated from the Audit Committee or referred Separate Risk Management Committee (SRMC). This research was conducted using Logistic Regression as a test of the hypothesis. Data collection in this study using purposive sampling to non-banking financial companies listed at the Indonesia Stock Exchange in 2011. as many as 219 companies are used as samples in this study. Result of this study showed that the variables that affect existence of Risk Management Committee joined with the Audit Committee is affiliated with the Audit Committee is Reputation of External Auditor. Meanwhile, the variables that affect the existence of a separate Risk Management Committee separated from the Audit Committee is Leverage.

Key words: Corporate Governance, Risk Management Committee

PENDAHULUAN

Sistem perbankan BNI pada tahun 2003 mengalami kebobolan akibat transaksi surat kredit atau *letter of credit* (L/C) fiktif, yaitu penyimpangan terhadap prosedur bank. Penyimpangan terhadap prosedur bank tersebut berupa surat kredit (L/C) yang diterbitkan bukan berasal dari bank koresponden, syarat – syarat surat kredit (L/C) yang tidak terpenuhi, diskonto yang dilakukan sebelum akseptasi *opening bank* (Bank Pembuka L/C), sampai dengan pemalsuan dokumen surat kredit (L/C). Alasan mendasar kasus tersebut bisa terjadi pada BNI adalah akibat tidak diterapkannya Manajemen Risiko, sehingga BNI tidak mampu mendeteksi dan mencegah risiko yang akan dihadapi oleh Perusahaan. Bank Indonesia di tahun 2003 telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko pada Bank di Indonesia, dimana setiap perbankan di Indonesia wajib menyerahkan rencana aksi (*action plan*) mengenai penerapan Manajemen Risiko. Peraturan tersebut hanya mewajibkan perbankan untuk menyerahkan *action plan* penerapan Manajemen Risiko, bukan mewajibkan adanya manajemen risiko pada perusahaan. Pada tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Pembentukan Komite Pemantau Risiko harus dibentuk paling lambat pada akhir tahun 2007, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia.

Bagi dunia Internasional, penerapan Manajemen Risiko mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya inisiatif perusahaan dalam penerapan *good corporate governance*, hal tersebut terjadi akibat skandal akuntansi yang dialami oleh Enron dan Worldcom. Peningkatan tata kelola perusahaan ditekankan pada peranan dari Manajemen Risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009), karena sistem Manajemen Risiko yang efektif dan efisien serta mampu memenuhi kualitas yang ada akan membuat perusahaan mencapai tujuan usaha dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan sehingga mampu menjaga reputasi perusahaan.

Berdasarkan data Laporan Inflasi Bank Indonesia tahun 2012, keadaan ekonomi Indonesia selama tahun 2012 yang diukur berdasarkan tingkat inflasi *year- on – year* bulan September

sebesar 4,31 % masih dianggap berada pada standar inflasi rendah karena berada antara nilai 0 – 9,9%. Pada faktanya, keadaan ekonomi Indonesia tidak hanya diukur oleh tingkat inflasi saja, sehingga membuat perusahaan bersaing dengan sistem perusahaan yang kompleks serta meningkatkan kualitas mereka dalam menghadapi keadaan yang penuh risiko. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan pengungkapan Manajemen Risiko perusahaan. Sistem Manajemen Risiko merupakan salah satu perangkat utama dalam mengurangi dan menghadapi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Informasi yang berasal dari Manajemen Risiko digunakan oleh pihak internal yaitu perusahaan itu sendiri dan pihak eksternal yaitu investor, pemasok, kreditur dan pemegang saham. Pihak internal perusahaan membutuhkan informasi dari Manajemen Risiko sebagai dasar untuk melakukan analisis risiko perusahaan agar *feed back* yang diharapkan oleh pihak internal mampu diterima dengan maksimal.

Pembentukan RMC memiliki perkembangan signifikan pada tahun – tahun terakhir ini, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa 80 Dewan Direksi dari 200 perusahaan di Australia mengungkapkan bahwa 54% responden organisasi telah mendirikan RMC, bahkan 70% dari responden yang telah mendirikan RMC, memiliki RMC yang diintegrasikan dengan Komite Audit (Subramaniam, *et al.*, 2009). Terdapat keprihatinan yang meningkat atas struktur pada perusahaan, yaitu pembentukan dewan sub – komite dan hubungan antar komite tersebut. Pembentukan dewan sub – komite secara sistematis berkaitan dengan faktor atas tata kelola organisasi, seperti komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan oleh organisasi dan ukuran organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan KPMG tahun 2005 (Subramaniam, *et al.*, 2009) pembentukan RMC secara umum tergabung dengan Komite Audit, hal tersebut membuat beberapa pihak melakukan kritik dan memberikan tindakan skeptis atas kinerja dari RMC, terutama ketika RMC yang tergabung dalam Komite Audit bertanggung jawab penuh atas pelaporan keuangan dan Manajemen Risiko, sehingga tekanan atas rendahnya tingkat efisiensi RMC dan Komite Audit tersebut terlihat semakin jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik Dewan Komisaris perusahaan terhadap pengungkapan RMC dan tipe RMC yang dibentuk oleh perusahaan. Penelitian ini dimotivasi juga oleh kenaikan signifikan atas pembentukan RMC, terutama pembentukan SRMC.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian mengenai bentuk dan struktur dari mekanisme perusahaan seperti *Risk Management Committee* relevan dengan *agency theory* sebagai teori utama. *Agency Theory* merupakan teori yang digunakan dalam menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) antara dua individu, yaitu *principal* dengan *agent*. *Agent* melakukan sebuah kontrak jasa dengan *principal* untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu, dan *principal* memberi *fee* kepada agen atas jasa tersebut (Subramaniam, *et al.*, 2009). Karena *principal* selalu tertarik dengan hasil – hasil yang diberikan oleh *agent*, disinilah teori keagenan memberikan landasan bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi atas suatu kejadian.

Agency Theory mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* sulit tercipta karena perbedaan preferensi yang tidak selaras atau kepentingan yang bertentangan (*conflict of interest*) (Meisser, *et al.*, 2008). Perbedaan tersebut yang menimbulkan permasalahan yang disebut asimetris informasi, yaitu keadaan dimana ketika distribusi informasi yang diketahui kedua belah pihak tidak lengkap atau tidak seimbang antara informasi yang diterima oleh *principal* atau *agent*, sehingga konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh *principal* maupun *agent*. Umumnya asimetris informasi terjadi dalam keadaan manajer secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai keadaan yang sebenarnya daripada pemilik, yang umumnya tidak ada di tempat (*absentee owner*). Asimetris informasi dapat menimbulkan permasalahan atau *agency problem* yang disebabkan karena kesulitan *principal* dalam melakukan kontrol atau pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua macam *agency problem* yaitu *Moral – Hazard* dan *Adverse Selection*.

Agency Theory mengasumsikan bahwa *principal* maupun *agent* bertindak atas kepentingan mereka sendiri, ketika terjadi masalah antara *agent* dan *principal* dalam perusahaan, yang dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan konflik dalam hubungan tersebut. Konflik antara *agent* dan *principal* dalam *Agency Theory* disebut dengan *Agency Conflict*. *Agency*

Conflict terjadi ketika para manajer ingin memaksimalkan tingkat kepuasannya sendiri, di pihak lain pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimal.

Untuk teori yang lebih kompleks, digunakan *signaling theory* untuk memahami kembali mekanisme perusahaan. Teori *Signalling* digunakan untuk mengatasi masalah asimetris informasi yang terjadi dalam pasar. Untuk mengurangi asimetris informasi yang terjadi, perusahaan akan mengungkapkan seluruh informasi yang dimiliki oleh perusahaan berupa informasi keuangan maupun non keuangan, semua itu dilakukan untuk menciptakan citra yang menguntungkan di pasar. Ketika sebuah perusahaan mengungkapkan informasi sebanyak mungkin bagi pihak eksternal, perusahaan tersebut dianggap memiliki tata kelola yang baik karena memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Berbeda ketika perusahaan berusaha untuk mengurangi informasi yang ada, pihak eksternal akan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan karena sedikitnya informasi yang didapatkan.

Signalling Theory juga menunjukkan konsistensi yang besar terhadap adanya pengungkapan yang luas, yaitu bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi dengan baik berarti perusahaan tersebut mengasingkan diri dan memiliki kesan yang kurang baik, yaitu bersifat kurang informatif terhadap pasar mengenai keberadaannya. Dalam hubungan antara *agent* dan *principal*, Teori *Signalling* mendasari perilaku *agent* dalam mengolah informasi yang akan diberikan kepada *principal* agar sesuai dengan keinginan dan mampu memuaskan atau mengandung *good news*. *Good news* dianggap mampu memprediksi prospek perusahaan di masa yang datang akan menjadi lebih baik, para pengguna informasi yaitu *principal* menganggap informasi yang mengandung *good news* dan lebih banyak itu lebih baik dalam mengukur prediksi perusahaan, walaupun informasi yang mengandung *bad news* di hilangkan oleh *agent*.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Keberadaan RMC

Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang ditujukan untuk Manajemen Risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar diharapkan mampu mengurangi *agency problem* yang dihadapi oleh perusahaan, karena ketika jumlah Dewan Komisaris lebih besar, maka pengawasan atas perilaku *agent* akan lebih ditingkatkan.

Salah satu sistem pengawasan yang disediakan oleh Dewan Komisaris adalah keberadaan RMC. Ketika jumlah anggota Dewan Komisaris besar maka peluang dalam memilih anggota Dewan Komisaris dengan kemampuan dan kualitas yang baik dalam mengatur sub – komite dibawahnya termasuk Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

- H1a : Jumlah Anggota Dewan Komisaris berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC
- H1b : Jumlah Anggota Dewan Komisaris berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

Proporsi Komisaris Independen terhadap Keberadaan RMC

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), independensi merupakan hal utama yang harus diterapkan oleh perusahaan. Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu Dewan Komisaris merupakan sebuah indikator independensi dari Dewan Komisaris tersebut. Kecenderungan yang terjadi adalah makin tinggi proporsi Komisaris Independen maka akan cenderung tinggi dalam menyediakan pengawasan kepada aktivitas perusahaan untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Pincus, *et al.*, (1989) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keberadaan Komisaris Independen di dalam Dewan Komisaris akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholder*.

Perusahaan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan dan dengan membentuk RMC, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggung jawab pengawasan Manajemen Risiko dibandingkan dengan proporsi *non Executive Director* yang rendah. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih menyukai pembentukan

RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC ini akan bisa lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko perusahaan. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mensyaratkan keberadaan Komisaris Independen pada seluruh perusahaan publik. Keputusan Menteri BUMN No 117/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Selain itu, pembentukan RMC pada perusahaan diharapkan mampu memberikan informasi berupa *good news* kepada para pengguna laporan keuangan, karena dengan adanya pembentukan RMC maka memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap penanggulangan risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

- H2a : *Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC*
- H2b : *Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC*

Reputasi Auditor Eksternal terhadap Keberadaan RMC

Pada saat ini auditor menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting bagi Manajemen Risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan dalam Subramaniam, *et al.*, (2009), menyatakan bahwa *Big Four* audit akan meningkatkan kualitas monitoring internal yang terdapat pada klien mereka, lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas monitoring internal dari *non Big Four* audit. Penelitian terdahulu menemukan hubungan positif antara perusahaan audit *Big Four* dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi (Cohen, *et al.*, 2004 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

Perusahaan audit yang tergabung dalam *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non *Big Four*. Tuntutan seperti itu dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kualitas audit dan untuk melindungi reputasi mereka, sehingga dipandang oleh pengguna eksternal memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, tekanan yang lebih besar akan terdapat pada perusahaan yang menggunakan jasa audit *Big Four* untuk membentuk RMC dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa audit *non Big Four*. Selain itu, pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit akan dipilih oleh auditor *Big Four* dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Yatim (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *Big Four* cenderung untuk membentuk RMC. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

- H3a : *Reputasi Auditor Eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC*
- H3b : *Reputasi Auditor Eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC*

Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki perusahaan, yang disajikan pada *Annual Report* perusahaan. Perusahaan dengan jumlah segmen bisnis yang lebih dari satu, umumnya memiliki lebih banyak produk, strategi, dan bagian pemasaran. Akibat dari hal tersebut, kompleksitas perusahaan yang besar akan meningkatkan risiko yang berbeda, termasuk risiko operasional. Sehingga perusahaan akan cenderung menuntut pembentukan komite dalam memantau risiko serta menyajikan *good news* kepada pengguna eksternal, bahwa perusahaan memiliki komitmen atas risiko yang dihadapi. Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

- H4a : *Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC*

H4b : Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

Risiko Pelaporan Keuangan

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, et al., 2009). Pembentukan RMC dan terutama SRMC, akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko-risiko tersebut.

Risiko pelaporan keuangan dapat diminimalkan dengan penerapan *Agency Theory* yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan. *Agency theory* memposisikan konflik antara *principal* dan *agent* dapat diredakan dengan pelaporan keuangan yang rutin dan cara *principal* melakukan pemantauan langsung atas kinerja *agent*. Pelaporan keuangan yang baik akan merendahkan biaya modal perusahaan karena hanya ada sedikit ketidakpastian terhadap perusahaan yang melaporkan secara luas dan dapat dipercaya, sehingga risiko investasi menjadi lebih kecil (Dita, 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H5a : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H5b : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung memiliki perjanjian utang dan risiko yang lebih tinggi. Peminjam menuntut pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya terjadi permintaan yang lebih besar bagi perusahaan untuk mendirikan RMC sebagai komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan risiko dan kebijakan Manajemen Risiko yang akan diambil perusahaan. RMC yang terpisah dapat berfungsi lebih efektif dalam pengawasan risiko (Subramaniam, et al., 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H6a : *Leverage* berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H6b : *Leverage* berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Risk Management Committee* (RMC) dan *Separate Risk Management Committee* (SRMC), yang diukur dengan *dummy*. Variabel Independen dalam penelitian ini, adalah :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris (BOARDSIZE)
Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan tersebut.
2. Proporsi Komisaris Independen (NONXECDIR)
Pada *two tier system* Dewan Komisaris sangat penting fungsinya dalam mekanisme pemantauan perilaku manajemen. Proporsi dari Komisaris Independen di dalam Dewan Komisaris merupakan kunci penting independensi sebuah dewan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini *Non Executive Director* diungkapkan sebagai Komisaris Independen, dan proporsi *Non Executive Director* diukur dengan Jumlah Komisaris Independen dibagi Jumlah total anggota Dewan Komisaris.

$$\text{NONXECDIR} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah total anggota Dewan Komisaris}}$$

3. Reputasi Auditor Eksternal (BIGFOUR)
Reputasi auditor eksternal ditunjukkan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik, dimana suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternalnya yang tergabung dalam KAP *Big Four*. Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana diberi nilai satu (1) untuk perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* dan nilai nol (0) untuk perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tidak tergabung dengan *Big Four*.
4. Kompleksitas Perusahaan (BUSSEGMENT)
Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis atau usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Segmen bisnis atau usaha yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat pada *Annual Report* perusahaan.
5. Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)
Perusahaan dengan perbandingan asset yang lebih besar dibandingkan dengan piutang usaha dan persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini risiko pelaporan ekuangan diukur dengan menjumlahkan piutang dan persediaan dibagi dengan total asset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

6. *Leverage* (LEV)
Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu disebut dengan *leverage*. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total asset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

Penelitian ini menggunakan variable kontrol ukuran perusahaan (SIZE). Variabel Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009), ukuran perusahaan diukur dengan menjumlahkan total asset perusahaan. Pernyataan tersebut didukung penelitian sebelumnya, menggunakan *total assets*, hal tersebut didasarkan pada penelitian Dyreng, *et al.*, (2007). Semakin besar total assets perusahaan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Selain itu, asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. SIZE = log of Total Assets.

Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2011. Penggunaan tahun penelitian 2011 dilakukan karena penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat keberadaan *Risk Management Committe* pada perusahaan di Indonesia pada tahun 2011 serta melihat kembali ketaatan perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Perusahaan *non* keuangan dan perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan yang menerbitkan *Annual Report* pada periode tahun 2011
3. Datanya lengkap dan siap untuk diteliti.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis *logistic regression* dengan menggunakan persamaan, yaitu :

$$\text{Logit RMC} = \alpha + \beta_1\text{BOARDSIZE} + \beta_2\text{NONEXECDIR} + \beta_3\text{BIGFOUR} + \beta_4\text{BUSSEGMENT} + \beta_5\text{FINREP} + \beta_6\text{LEV} + e$$

$$\text{Logit SRMC} = \alpha + \beta_1\text{BOARDSIZE} + \beta_2\text{NONEXECDIR} + \beta_3\text{BIGFOUR} + \beta_4\text{BUSSEGMENT} + \beta_5\text{FINREP} + \beta_6\text{LEV} + e$$

Keterangan:

RMC	=	Variabel dummy keberadaan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
SRMC	=	Variabel dummy keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari Komite Audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
α	=	Konstanta
NONEXECDIR	=	Proporsi Komisaris Independen terhadap total anggota Dewan Komisaris
BOARDSIZE	=	Jumlah Anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan
BIGFOUR	=	Variabel dummy dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal Big Four diberi nilai 1, dan 0 untuk sebaliknya.
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas Perusahaan
FINREP	=	Risiko pelaporan keuangan
LEV	=	<i>Leverage</i>
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas Perusahaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Data yang telah diseleksi berdasarkan kriteria penyamplingan yang telah ditetapkan dan mengandung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 256 perusahaan. 37 perusahaan tidak memiliki kelengkapan informasi untuk variable penelitian, sehingga jumlah akhir sampel yang layak diobservasi adalah 219 perusahaan yang dapat dilihat pada table 1

Tabel 1
Daftar Perusahaan Sampel Berdasarkan Jenis Industri

No	Jenis Industri	Jumlah Sampel	Presentase
1	Pertanian	11	5,02 %
2	Pertambangan	22	10,04 %
3	Dasar dan Kimia	36	16,43 %
4	Aneka Industri	27	12,33 %
5	Barang Konsumsi Publik	20	9,13 %
6	Property, Perumahan dan Konstruksi	26	11,88 %
7	Infrastruktur, Peralatan dan Transportasi	14	6,40 %
8	Perdagangan, Jasa dan Investasi	63	28,77 %
	Jumlah	219	100 %

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Perusahaan – perusahaan sampel tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan keberadaan RMC dan keberadaan SRMC. Tabel 2 menjelaskan perusahaan yang memiliki keberadaan RMC dan tidak memiliki keberadaan RMC. Serta menjelaskan pula perusahaan yang memiliki RMC yang terpisah dari Komite Audit atau SRMC, dan perusahaan yang memiliki RMC yang tergabung dengan Komite Audit. Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki RMC sebanyak 189 perusahaan atau 86,3 % dari 219 perusahaan. Sedangkan 13,7 % atau 30 perusahaan tidak memiliki keberadaan RMC.

Tabel 2
Distribusi Keberadaan RMC dan SRMC

	Frekuensi	Presentase		Frekuensi	Presentase
RMC	189	86,3 %	SRMC	36	19 %
Non RMC	30	13,7 %	Non SRMC	153	81 %
Total	219	100 %	Total	189	100 %

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki SRMC sebanyak 36 perusahaan atau 19 % dari 189 perusahaan yang memiliki RMC. Sedangkan 81 % atau 153 perusahaan hanya memiliki RMC yang tergabung dengan Komite Audit. Hal ini terjadi, karena pemberntukan RMC terutama SRMC bagi perusahaan non perbankan masih dilandasi atas dasar kesukarelaan bukan kewajiban yang diatur dalam sebuah peraturan.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	RMC		SRMC	
	Mean	Std. Dev	Mean	Std. Dev
BOARDSIZE	4.2511	1.84638	4.3333	1.86513
NONEXECDIR	.3786	.13879	.3831	.13047
FINREP	.5734	.59353	.5632	.58433
LEV	.3078	.24761	.2999	.21818
BUSSEGMENT	2.48	1.788	2.6455	2.65503
SIZE	10.1738	2.19005	10.0848	2.22941

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Deskripsi Variabel

BOARDSIZE untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 4.251 dengan standar deviasi 1.846, yang berarti bahwa setiap sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian rata – rata memiliki Jumlah Dewan Komisaris sekitar 4 orang anggota.. BOARDSIZE untuk perusahaan yang memiliki RMC memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 4.333 dengan standar deviasi 1.86, yang berarti bahwa setiap sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian rata – rata memiliki Jumlah Dewan Komisaris sekitar 4 orang anggota.

NONEXECDIR untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0.3786 dengan standar deviasi 0.13879. Rata – rata (*mean*) mengindikasikan bahwa rata – rata sampel perusahaan memiliki kurang lebih 37,86 % proporsi Komisaris Independen dari total seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. NONEXECDIR untuk perusahaan yang memiliki RMC memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0,3831 dengan standar deviasi 0,13947. Rata – rata (*mean*) mengindikasikan bahwa rata – rata sampel perusahaan memiliki kurang lebih 38,31 % proporsi Komisaris Independen dari total seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Variabel kompleksitas usaha atau lini bisnis perusahaan (BUSSEGMENT) berdasarkan Tabel 4.1, BUSSEGMENT untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 2.48 dengan standar deviasi 1.788. Rata – rata (*mean*) menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki segmen perusahaan berjumlah 2 sampai 3 segmen usaha. BUSSEGMENT untuk total perusahaan sampel yang memiliki RMC memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 2.645 dengan standar deviasi 2.655. Rata – rata (*mean*) menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki segmen perusahaan berjumlah 2 sampai 3 segmen usaha.

Variabel Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP) untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0.5734 dengan standar deviasi 0.5935, menunjukkan bahwa setiap perusahaan sampel total rata-rata menghadapi risiko atas pelaporan keuangan yang melibatkan persediaan dan piutang dagang terhadap total asset sebesar 59,35 %. FINREP untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0.5632 dengan standar deviasi 0.58433, menunjukkan bahwa setiap perusahaan sampel yang memiliki RMC rata-rata menghadapi risiko atas pelaporan keuangan yang melibatkan persediaan dan piutang dagang terhadap total asset sebesar 56,32 .

Variabel *leverage* yang menggunakan simbol LEV untuk total perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0,3078 dengan standar deviasi 0.2476, menunjukkan bahwa rata – rata setiap sampel perusahaan memiliki tingkat *leverage* sebesar 30,78 %. LEV untuk total perusahaan sampel yang memiliki RMC, memiliki nilai rata – rata (*means*) sebesar 0.2999 dengan standar deviasi 0.21818, menunjukkan bahwa rata – rata setiap sampel perusahaan memiliki tingkat *leverage* sebesar 29,99

Pengukuran ukuran perusahaan yang menjadi sampel penelitian dilakukan dengan rumus logaritma total asset yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Pada analisis statistik deskriptif, SIZE

pada tabel 4.1 menunjukkan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 10.1738 dengan standar deviasi 2.19005, nilai rata – rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki nilai ukuran perusahaan yang bervariasi. Rata – rata (*mean*) menunjukkan bahwa rata – rata setiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki log ukuran perusahaan sebesar 10,1738. Sedangkan untuk sampel yang memiliki RMC, menunjukkan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 10.0848 dengan standar deviasi 2.22941, nilai rata – rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki nilai ukuran perusahaan yang bervariasi. Rata – rata (*mean*) menunjukkan bahwa rata – rata setiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki log ukuran perusahaan sebesar 10,0848.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Sign	Hubungan	Hasil
1(a)	Ukuran Dewan Komisaris berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,752	Positif	Ditolak
1(b)	Ukuran Dewan Komisaris berhubungan positif dengan keberadaan SRMC	0,301	Positif	Ditolak
2(a)	Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,556	Positif	Ditolak
2(b)	Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan keberadaan SRMC	0,249	Positif	Ditolak
3(a)	Reputasi Auditor Independen berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,007	Positif	Diterima
3(b)	Reputasi Auditor Independen berhubungan positif dengan keberadaan SRMC	0,223	Positif	Ditolak
4(a)	Kompleksitas Perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,768	Positif	Ditolak
4(b)	Kompleksitas Perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC	0,165	Positif	Ditolak
5(a)	Risiko Pelaporan Keuangan berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,869	Positif	Ditolak
5(b)	Risiko Pelaporan Keuangan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC	0,873	Positif	Ditolak
6(a)	<i>Leverage</i> berhubungan positif dengan keberadaan RMC pada	0,287	Positif	Ditolak
6(b)	<i>Leverage</i> berhubungan positif dengan keberadaan RMC pada	0,004	Positif	Diterima
7(a)	Variabel Kontrol Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan RMC	0,892	Positif	Ditolak
7(b)	Variabel Kontrol Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan SRMC	0,296	Positif	Ditolak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 1(a) dan 1(b) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien 0.044 dan nilai signifikansi sebesar 0.752 (lebih besar dari 0.05) dan Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien 0.109 dan nilai signifikansi sebesar 0.301 (lebih besar dari 0.05) yang artinya keberadaan RMC dan SRMC tidak berhubungan signifikan namun memiliki hubungan positif dengan ukuran Dewan Komisaris. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) dan Setyarini (2011), yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Ukuran Dewan Komisaris dan keberadaan RMC. Alasan yang bisa diberikan adalah, bahwa dalam ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar tidak menjamin terjadinya pertukaran keahlian, informasi dan pikiran antar Dewan Komisaris. Jensen dan Meckling

(1976) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang besar akan menimbulkan biaya *monitoring* yang besar sehingga akan menimbulkan in – efisiensi dan in – efektivitas di dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, ukuran dewan yang lebih besar belum tentu bisa menjamin arus pertukaran keahlian, informasi, dan pikiran akan menjadi lebih luas. Ukuran dewan yang cukup besar menghambat efisiensi dan efektivitas didalam pengambilan kebijakan dan menurut Jensen dan Meckling (1976), ukuran dewan yang besar juga menimbulkan biaya *monitoring* yang lebih besar.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 2(a) dan 2(b) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa variabel proporsi Komisaris Independen memiliki nilai koefisien 1.068 dan nilai signifikansi sebesar 0,556 (lebih besar dari 0,05), yang artinya keberadaan RMC tidak berhubungan signifikan dan positif dengan proporsi Komisaris Independen. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel proporsi Komisaris Independen memiliki nilai koefisien 1.952 dan nilai signifikansi sebesar 0,249 (lebih besar dari 0,05), yang artinya keberadaan SRMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan proporsi Komisaris Independen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009), Andarini dan Januarti (2010) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan signifikan dan positif antara proporsi Komisaris Independen dengan keberadaan SRMC. Andarini dan Januarti (2010) menyatakan bahwa di Indonesia secara lebih sempit menyatakan pengangkatan Komisaris Independen oleh perusahaan hanya untuk memenuhi ketentuan perundangan tanpa dimaksudkan menegakkan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Tidak ada hubungan yang signifikan dan positif proporsi Komisaris Independen terhadap keberadaan SRMC dikarenakan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar belum tentu akan membuat keputusan berupa pembentukan SRMC dalam *corporate governance* mereka, karena latar belakang pendidikan dan kualitas dari Dewan Komisaris lebih menentukan kualitas yang dimiliki oleh Dewan Komisaris tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara proporsi Komisaris Independen dengan keberadaan RMC.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 3(a) diterima**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor memiliki nilai koefisien 2.137 dan nilai signifikansi sebesar 0.007 (lebih kecil dari 0.05), yang artinya keberadaan RMC berhubungan signifikan dan positif dengan reputasi auditor eksternal. Alasan yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa saat ini peran dari auditor eksternal tidak hanya terbatas pada pemberian jasa pada tingkat keuangan klien, namun juga menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting dalam keberadaan RMC. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 3(b) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor memiliki nilai koefisien 0,554 dan nilai signifikansi sebesar 0.223 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan SRMC tidak berhubungan signifikan dan positif dengan reputasi auditors eksternal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009) dan Andarini dan Januarti (2010) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan signifikan dan positif antara reputasi auditor dengan keberadaan SRMC. Sesuai dengan pernyataan Andarini dan Januarti (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan auditor *Big Four* hanya untuk menaikkan reputasi perusahaan saja.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 4(a) dan 4(b) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan memiliki nilai koefisien 0.320 dan nilai signifikansi sebesar 0.768 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan RMC tidak berhubungan signifikan dan positif dengan segmen usaha perusahaan. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel ukuran kompleksitas perusahaan memiliki nilai koefisien 0.089 dan nilai signifikansi sebesar 0.223 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan SRMC tidak berhubungan signifikan dan positif dengan segmen usaha perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.* (2009), karena dalam penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009) dan Andarini dan Januarti (2010). Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pengukuran variabel kompleksitas perusahaan dengan menggunakan *proxy* jumlah usaha kurang tepat.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 5(a) dan 5(b) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa variabel risiko pelaporan keuangan memiliki nilai koefisien 0.048 dan nilai signifikansi sebesar 0.869 (lebih besar dari 0.05), yang

artinya keberadaan RMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan risiko pelaporan keuangan. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel risiko pelaporan keuangan memiliki nilai koefisien 0.077 dan nilai signifikansi sebesar 0.873 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan SRMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan risiko pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009). Dalam penelitian Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa proporsi piutang dan persediaan yang lebih besar akan meningkatkan risiko pelaporan keuangan, sehingga perusahaan dituntut untuk membentuk RMC terutama SRMC. Dalam kenyataannya auditor internal yang dimiliki oleh perusahaan memiliki standar penilaian tersendiri atas piutang dan persediaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andarini dan Januarti (2010), yang menyatakan bahwa Komite Audit dan Audit Internal lebih berperan dalam memastikan penilaian atas piutang dan persediaan, dimana Komite Audit bertanggung jawab memberikan gambaran sebenarnya atas kondisi keuangan perusahaan dan Auditor Internal bertanggung jawab menjaga kekayaan perusahaan. Persediaan dan piutang yang lebih besar tidak menjamin risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan semakin besar pula, karena perusahaan tidak hanya menghadapi satu jenis risiko tapi juga menghadapi 8 jenis risiko lainnya seperti yang diatur dalam PMK Nomor 142/PMK/010/2009.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, **Hipotesis 6(a) ditolak**. Hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai koefisien 0.758 dan nilai signifikansi sebesar 0.287 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan RMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan *leverage*. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan keberadaan RMC. Dengan tingginya *leverage*, maka ketika perusahaan membentuk komite seperti RMC akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan secara langsung akan membebani keuangan perusahaan, dimana perusahaan akan lebih fokus terhadap efisiensi kinerja dan performa keuangan perusahaan. **Hipotesis 6(b) diterima**. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai koefisien 0.356 dan nilai signifikansi sebesar 0.004 (lebih kecil dari 0.05), yang artinya keberadaan SRMC berhubungan signifikan dan positif dengan *leverage*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap keberadaan SRMC. Goodwin dan Kent (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kewajiban jangka panjang semakin besar pula risiko keuangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban yang besar cenderung memiliki perjanjian atas utang yang lebih besar pula, hal tersebut akan meningkatkan risiko atas kelangsungan usaha mereka. Sehingga perusahaan akan membentuk RMC terutama SRMC sebagai komite pengawasan risiko mereka.

Variabel kontrol yang diwakili oleh ukuran perusahaan diukur dengan menjumlahkan total asset kemudian menghitung *log* dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan SPSS, hasil pengujian Regresi Logistik I menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien 0.015 dan nilai signifikansi sebesar 0.892 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan RMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Hasil pengujian Regresi Logistik II menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien 0.098 dan nilai signifikansi sebesar 0.296 (lebih besar dari 0.05), yang artinya keberadaan SRMC tidak berhubungan signifikan namun berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya *agency* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pembentukan komite dalam perusahaan seperti RMC dan SRMC akan membuat biaya *agency* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin besar pula. Perusahaan akan lebih fokus terhadap efisiensi dari kinerja dan keuangan perusahaan, sehingga tidak akan mengeluarkan biaya lebih untuk *agency cost*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan KPMG (2001) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009), yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin besar pula pembentukan RMC dan SRMC secara sukarela. Namun, tingkat sukarela pembentukan RMC dan SRMC tidak hanya diukur oleh ukuran perusahaan semata. Ukuran perusahaan juga tidak bisa menginterpretasikan risiko keseluruhan yang akan dihadapi oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Pada pengujian menilai model fit untuk kedua model regresi logistik, tidak ditemukan adanya Multikolinearitas yang diukur dengan nilai *Correlation*. Kedua model regresi juga telah memenuhi standard penilaian Model Fit, yaitu menilai *Overall Fit Model*, Koefisien Determinasi, Uji Kelayakan Model Regresi dan Matriks Klasifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua model regresi merupakan model yang baik digunakan dalam penelitian. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari hipotesis yang telah diajukan dan telah diuji pada bagian sebelumnya, dari 12 hipotesis dan 2 hipotesis yang berhubungan dengan variabel kontrol diterima 2 hipotesis yang berhubungan signifikan dan positif dengan keberadaan RMC atau SRMC. Reputasi auditor eksternal berpengaruh positif dengan keberadaan RMC, sedangkan *leverage* berpengaruh positif dengan keberadaan SRMC.

Dalam penelitian ini ada beberapa kelemahan dan keterbatasan atas penelitian ini, yaitu, Nilai *Nagelkerke Square* pada penelitian ini masih tergolong rendah, yaitu 0.142 atau 14,2% untuk RMC dan 0.174 atau 17,4% untuk SRMC. Nilai tersebut menunjukkan masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap kemungkinan keberadaan RMC dan SRMC.

Setelah menganalisis hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah menambah variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Karena, keberadaan RMC dan SRMC dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang belum dijadikan variabel dalam penelitian ini akibat keterbatasan penelitian.

REFERENSI

- Andarini, Putri dan Indira Januarti. 2010. "Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris Dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go Public Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 - No. 1, Juni 2012
- Bank Indonesia. 2011. "Laporan Inflasi" <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/>, diakses tanggal 9 November 2012. halaman.
- Bappepam-LK. 2008. Studi Penerapan Prinsip – Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan BAPPEPAM Mengenai Corporate Governance. Jakarta.
- Bappepam-LK. 2010. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara – Negara Anggota ACMF. Jakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2006. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jakarta.
- Goodwin-Stewart and Kent, P. (n.d). "The relation between external audit fees, audit committee characteristics and internal audit", *Accounting and Finance (in press)*.
- Idris, Tedy Fardiansyah. 2008 . "Buruknya Manajemen Risiko Biang Kerok Bobolnya L/C BNI". <http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/buruknya-manajemen-risiko-biang-kerok.html>, diakses tanggal 3 Mei 2012.
- Jensen, Michael C., William H. Mecklin. 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure, "*Journal of Financial Economics* 3", pp. 305-360.
- Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Pratika, Briana Dita. 2011. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Risiko (Pada Perusahaan Yang Listing di BEI)". Skripsi S1. Universitas Diponegoro. Semarang.
- SD Dyreng, M. H. 2007. Long Run Corporate Avoidance. "*The Accounting Review*". Vol. 85 Issue 4, pp. 1163 – 1189.



- Setyarini, Yudiati Indah. 2011. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee". Skripsi S1. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Subramaniam, Nava., Lisa McManus., Jiani Zhang. 2009. Corporate Governance, Firm Characteristics and Risk Management Committee Formation in Australian Companies. *"Managerial Auditing Journal"*, Vol. 24, Iss: 4 pp. 316 -339.
- William F. Messier, J., Gover, S. M., & Prawitt, D. F. (2008). Auditing and Assurance Service (A Systematic Approach). Jakarta: Salemba Empat.
- Yatim, Puan. 2010. "Board Structure and the Establishment of a Risk Management Committee by Malyasian Listed Firms". *"Journal of Management and Governance"*, Vol. 14 Issue 1, pp. 17 – 36.